

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan monitoring harga bapokting pada pasar tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode Triwulan III 2022 (bulan Juli s/d September) melalui *website* SiHapok Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting selama rentang waktu bulan Juli hingga September tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dianalisa sebagai berikut :

- a. Harga rata-rata komoditas beras cihirang (jenis R) meningkat dari semula Rp 7.500,- pada awal bulan Juli, meningkat hingga Rp 10.000,- pada akhir bulan September, kemudian bawang putih meningkat dari Rp 25.000,- menjadi Rp 27.000,- ;
- b. Komoditas cabai mengalami penurunan harga rata-rata sebesar Rp 20.000,-, bawang merah dari harga Rp 60.000,- pada awal bulan Juli menjadi Rp 35.000,- pada akhir bulan September dan minyak goreng sovia dari harga Rp 25.000,- mengalami penurunan harga menjadi Rp 17.000,- pada akhir bulan September;
- c. Harga rata-rata komoditas bahan bakar gas, mie instant, gula pasir, daging, ikan segar dan susu relatif stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 bulan terakhir.

Perkembangan harga bahan pokok Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan 3 2022 ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti beras dan bawang putih, namun upaya pengendalian harga bahan pokok masih terus dilakukan terutama dalam rangka memastikan ketersediaan barang di pasar dan menjaga kelancaran pasokan serta distribusi barang terutama disaat menjelang HUT Kalsel dan Kemerdekaan RI.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) hingga periode pelaporan triwulan III Tahun 2022 ini, antara lain :

- a. Adanya lonjakan permintaan komoditas seiring maraknya berbagai kegiatan dan perayaan yang berhubungan dengan HUT Kalsel dan RI;
- b. Cuaca dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Serangan hama burung manyar yang menyebabkan produksi beras lokal berkurang;
- d. Kenaikan harga BBM (pertalite, pertamax dan solar) yang ditetapkan Pemerintah sejak 3 September 2022 dan diperkirakan akan terus berlanjut dan memberi tekanan terhadap harga bahan pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikaitkan dengan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian inflasi, antara lain :

- a. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan meninjau harga bahan pokok di Pasar Los Batu Kandungan
- b. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan meninjau harga bahan pokok di Pasar Nagara
- c. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada 19 Poktan
- d. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan meninjau pasar murah basubuhan
- e. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagikan bibit cabe kepada 13 kelompok tani
- f. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
- g. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan HSS melaksanakan Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI) di setiap Kecamatan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa evaluasi terkait kebijakan pengendalian harga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

- a. Di Kabupaten Hulu sungai Selatan telah dilakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sembako melalui pasar murah/ Operasi pasar, dengan harapan dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga khusus yang lebih murah, Pelaksanaan pasar murah/ operasi pasar diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari kerumunan warga;
- b. Fenomena menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada umum nya terjadi kecenderungan kenaikan harga pangan pokok, dimana pelaku pasar/pedagang cenderung menaikkan harga komoditi karena biasanya terjadi lonjakan permintaan dari konsumen;
- c. Pelaksanaan gelar pasar murah Toko Tani Indonesia dilaksanakan pada akhir bulan Juni sampai akhir November oleh Dinas Ketahanan Pangan di semua Kecamatan dalam rangka stabilisasi pangan dan pemenuhan pangan pokok masyarakat;
- d. Dalam rangka mengatasi surplus produksi gabah petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan program GaLiRasNi (PeGAwai MembeLI BeRAS PetaNI) untuk menjaga stabilitas harga Gabah yang launching pada bulan Juli 2022;
- e. Komunikasi efektif dalam bentuk penyebarluasan informasi harga kebutuhan pokok dan penting melalui SiHapok sebagai dasar analisis dalam merumuskan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi lonjakan harga di tingkat pasar belum bersifat *realtime*;
- f. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Surat Edaran tentang Tertib Penyaluran/ Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- g. Launching Program GaLiRasNi (Pegawai Membeli Beras Petani) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- a. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan strategis maupun bahan kebutuhan pokok sangat dibutuhkan sebagai early warning bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi selanjutnya dikaitkan dengan salah satu strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, sehingga akan dilakukan koordinasi lebih intensif dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait upaya pemenuhan hal-hal tersebut;
- b. Melakukan penyebaran rumah pangan atau toko tani tidak hanya di satu tempat;
- c. Memastikan keberlangsungan pasokan dan kestabilan permintaan melalui kerja sama antar daerah dengan juga memanfaatkan peluang dari berkembangnya platform digital (*e-commerce*);
- d. Secara rutin TPID melakukan pemantauan harga pasar terhadap beberapa komoditas pokok, dan segera melakukan langkah-langkah antisipatif bila ditengarai ada kenaikan harga yang diluar kewajaran (operasi pasar, menggalakkan masyarakat menanam komoditas di pekarangan, diversifikasi pangan dll);
- e. Secara rutin melaksanakan pasar murah dengan bekerjasama dengan SKPD terkait, Perbankan dan Perusahaan Swasta.